

KESANTUNAN BERBAHASA DALAM DEBAT CALON KEPALA DAERAH SULAWESI TENGAH TAHUN 2024: KAJIAN PRAGMATIK

Mahfud Godal¹, Idrus², Siti Hadija Alaydrus³ Al-Afandi⁴

^{1,2,3,4}Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Alkhairaat Palu

1mahfudgodal031@gmail.com

ABSTRACT

This study examines language politeness in the 2024 public debate of governor and vice governor candidates of Central Sulawesi. Political debates are not only forums for presenting visions and missions but also arenas where candidates employ various communication strategies that may reflect politeness or violate politeness principles. Therefore, this study aims to describe the forms of language politeness and identify violations of politeness principles found in the debate. This research employed a descriptive qualitative approach within the framework of pragmatics. The data consisted of utterances produced by the candidates during the third segment of the debate, which involved direct interaction among candidates. Data were collected through observation and note-taking techniques and analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, including data reduction, data classification, and conclusion drawing. The findings revealed 91 utterances containing politeness forms and politeness violations. Based on Leech's politeness principle, five politeness maxims were identified, namely tact maxim, approbation maxim, agreement maxim, sympathy maxim, and modesty maxim. The most dominant politeness form was the tact maxim with 20 data, while the most frequent violation was the modesty maxim violation with 10 data. Based on Brown and Levinson's theory, three politeness strategies were found: positive politeness, negative politeness, and bald-on-record. Positive politeness was the most dominant strategy with 57 data. The findings indicate that language politeness in political debates functions not only to maintain social relationships but also as a political communication strategy to build self-image, influence public opinion, and defend arguments in a competitive context.

Keywords: *politeness, public debate, pragmatics, political communication strategies*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kesantunan berbahasa dalam debat publik pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024. Debat politik tidak hanya menjadi sarana penyampaian visi dan misi, tetapi juga menjadi ruang penggunaan berbagai strategi komunikasi yang dapat mencerminkan kesantunan maupun pelanggaran kesantunan berbahasa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk kesantunan berbahasa dan mengidentifikasi pelanggaran prinsip kesantunan yang muncul dalam debat tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam kajian pragmatik. Data penelitian berupa tuturan pasangan calon yang diperoleh dari segmen ketiga debat publik yang memuat interaksi langsung antarpasangan calon. Data dikumpulkan melalui teknik simak dan catat, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (2014) yang meliputi

reduksi data, klasifikasi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 91 data tuturan yang mengandung bentuk kesantunan dan pelanggaran kesantunan. Berdasarkan prinsip kesantunan Leech, ditemukan lima maksim kesantunan, yaitu maksim kebijaksanaan, penghargaan, kesepakatan, simpati, dan kerendahan hati. Maksim yang paling dominan adalah maksim kebijaksanaan sebanyak 20 data, sedangkan pelanggaran yang paling dominan adalah pelanggaran maksim kerendahan hati sebanyak 10 data. Berdasarkan teori Brown dan Levinson, ditemukan tiga strategi kesantunan, yaitu positive politeness, negative politeness, dan bald-on record. Strategi yang paling dominan adalah positive politeness dengan 57 data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesantunan berbahasa dalam debat politik tidak hanya berfungsi menjaga hubungan sosial, tetapi juga menjadi strategi komunikasi politik untuk membangun citra diri, memengaruhi masyarakat, dan mempertahankan argumentasi dalam situasi kompetitif.

Kata Kunci: kesantunan berbahasa, debat publik, pragmatik, strategi komunikasi politik

A. Pendahuluan

Bahasa merupakan sarana utama dalam membangun interaksi sosial, menyampaikan gagasan, dan membentuk hubungan antarmanusia. Menurut Chaer (2010), bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan kehendaknya dalam kehidupan sosial. Dalam konteks komunikasi politik, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai representasi sikap, etika, dan citra diri penutur di ruang publik. Hal tersebut tampak jelas dalam debat politik, khususnya debat calon kepala daerah, yang menjadi bagian penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Debat kandidat tidak hanya dimanfaatkan untuk menyampaikan

visi dan misi, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menilai kualitas kepemimpinan para calon melalui cara mereka berkomunikasi, merespons lawan debat, serta menyampaikan kritik dan argumentasi di hadapan publik.

Debat politik memiliki karakteristik komunikasi yang formal, terbuka, kompetitif, dan argumentatif. Kondisi tersebut menyebabkan interaksi dalam debat rentan memunculkan tindak tutur yang berpotensi mengancam muka (*face*) lawan tutur, seperti kritik langsung, penolakan terhadap argumen lawan, sanggahan, maupun penggunaan bahasa konfrontatif. Dalam situasi tertentu, kandidat cenderung menggunakan strategi bahasa yang tajam untuk mempertahankan posisi

politik dan menarik simpati pemilih. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa debat politik tidak hanya menjadi arena pertukaran gagasan, tetapi juga menjadi ruang pertarungan retorika dan strategi komunikasi politik. Menurut Mulyana (2005), wacana merupakan satuan bahasa yang lengkap dan utuh yang digunakan dalam komunikasi untuk menyampaikan gagasan, pandangan, maupun argumentasi dalam konteks tertentu. Oleh karena itu, kesantunan berbahasa menjadi aspek penting dalam menjaga kualitas komunikasi demokratis agar tetap berlangsung secara etis, santun, dan bermartabat. Pranowo (2009) menyatakan bahwa kesantunan berbahasa berfungsi menjaga keharmonisan hubungan sosial sehingga komunikasi dapat berlangsung secara efektif dan saling menghargai.

Dalam kajian pragmatik, kesantunan berbahasa dipahami sebagai strategi komunikatif yang digunakan penutur untuk menjaga hubungan sosial dan meminimalkan potensi konflik dalam interaksi. Nadar (2009) menjelaskan bahwa pragmatik mengkaji makna tuturan berdasarkan konteks penggunaannya sehingga hubungan antara bahasa dan situasi

tutur menjadi aspek penting dalam analisis komunikasi. Leech (1983) menyatakan bahwa kesantunan berkaitan dengan upaya meminimalkan ungkapan yang merugikan pihak lain dan memaksimalkan ungkapan yang menguntungkan pihak lain melalui prinsip-prinsip kesantunan, seperti maksim kebijaksanaan, kesepakatan, pujian, kerendahan hati, kedermawanan, dan simpati. Sementara itu, Brown dan Levinson (1987) memandang kesantunan sebagai strategi menjaga muka (*face*) penutur dan mitra tutur melalui strategi *positive politeness*, *negative politeness*, *bald on record*, dan *face threatening acts*. Dalam konteks debat politik, strategi kesantunan menjadi penting karena setiap tuturan kandidat tidak hanya dinilai berdasarkan isi argumen, tetapi juga berdasarkan etika komunikasi yang ditampilkan kepada masyarakat. Umami & Rusminto (2021) menjelaskan bahwa kajian pragmatik memberikan pemahaman mengenai penggunaan bahasa dalam interaksi sosial, termasuk bagaimana penutur mempertimbangkan konteks dan hubungan sosial dalam berkomunikasi.

Kajian mengenai kesantunan berbahasa dalam debat politik telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian Siswoyo & Yohanes (2024) menunjukkan bahwa debat calon presiden dan wakil presiden tahun 2024 cenderung merealisasikan prinsip kesantunan Leech melalui berbagai bentuk tuturan santun. Sementara itu, penelitian Aziz (2021) mengenai debat Pilkada DKI Jakarta menunjukkan bahwa pelanggaran kesantunan lebih dominan melalui penggunaan sindiran, ironi, dan kritik langsung. Meskipun demikian, penelitian mengenai kesantunan berbahasa dalam debat politik tingkat daerah, khususnya debat calon kepala daerah Sulawesi Tengah tahun 2024, masih relatif terbatas. Padahal, konteks politik lokal memiliki karakteristik sosial, budaya, dan pola komunikasi yang berbeda dengan debat politik tingkat nasional. Adapun temuan pada penelitian Haramain (2023) yang menunjukkan bahwa penggunaan tindak tutur dalam komunikasi politik sering dimanfaatkan untuk menyampaikan sikap, keyakinan, maupun argumentasi kepada khalayak.

Sulawesi Tengah merupakan wilayah yang memiliki keberagaman sosial, budaya, dan bahasa yang memengaruhi pola komunikasi masyarakatnya, termasuk dalam ranah politik. Penggunaan bahasa dalam debat politik di daerah ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, cara kandidat menyampaikan kritik, mempertahankan argumentasi, dan merespons lawan debat menjadi menarik untuk dikaji melalui perspektif pragmatik, khususnya kesantunan berbahasa. Menurut Wijana (1996), pemahaman terhadap suatu tuturan tidak dapat dilepaskan dari konteks yang melatarbelakanginya karena makna ujaran sering kali ditentukan oleh situasi tutur.

Debat calon kepala daerah Sulawesi Tengah tahun 2024 memperlihatkan variasi strategi kesantunan berbahasa yang bersifat kontekstual dan kompetitif. Dalam interaksi antara pasangan calon nomor urut satu dan pasangan calon nomor urut tiga, tampak adanya potensi ancaman muka (*face threatening acts*) melalui penyampaian kritik langsung serta penolakan terhadap dasar pertanyaan

lawan debat. Adapun penggunaan kalimat “saya mau jawab pertanyaannya sudah salah...” oleh pasangan calon nomor urut satu dalam debat calon kepala daerah Sulawesi Tengah tahun 2024 menunjukkan adanya strategi bertutur secara langsung atau *bald on record*. Tuturan tersebut disampaikan tanpa mitigasi sehingga berpotensi mengancam muka positif lawan tutur karena secara terbuka menyatakan bahwa pertanyaan yang diajukan keliru. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam debat politik, penggunaan bahasa tidak hanya berfungsi menyampaikan pendapat, tetapi juga menjadi sarana mempertahankan argumentasi dan menunjukkan ketegasan di hadapan publik. Rahardi (2005) menjelaskan bahwa pemilihan bentuk tuturan yang tepat sangat menentukan tingkat kesantunan berbahasa, terutama pada situasi komunikasi yang berpotensi menimbulkan konflik atau perbedaan pendapat. Sementara itu, pasangan calon nomor urut dua menunjukkan kecenderungan strategi kesantunan positif dengan membuka tanggapan melalui apresiasi terhadap jawaban lawan debat serta menyampaikan perbedaan

pandangan secara kooperatif dan tidak konfrontatif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada wujud kesantunan berbahasa serta bentuk pelanggaran prinsip kesantunan dalam debat calon kepala daerah Sulawesi Tengah tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk realisasi kesantunan berbahasa dan mengidentifikasi bentuk pelanggaran prinsip kesantunan yang muncul dalam interaksi debat politik. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pragmatik, khususnya dalam bidang kesantunan berbahasa pada komunikasi politik, serta menjadi referensi dalam membangun budaya komunikasi politik yang lebih etis, santun, dan demokratis di ruang publik.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Moleong (2017) menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks alamiah.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena kebahasaan secara mendalam melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata, sedangkan metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara rinci wujud kesantunan berbahasa serta bentuk pelanggaran prinsip kesantunan dalam debat calon kepala daerah Sulawesi Tengah tahun 2024. Penelitian ini berada dalam kajian pragmatik karena menelaah makna tuturan berdasarkan konteks situasi debat politik.

Data penelitian berupa tuturan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024 yang mengandung unsur kesantunan berbahasa maupun pelanggaran prinsip kesantunan. Sumber data penelitian diperoleh dari transkrip debat calon kepala daerah Sulawesi Tengah tahun 2024 yang ditayangkan melalui media resmi. Penelitian difokuskan pada segmen tiga debat karena pada segmen ini terjadi interaksi langsung antar pasangan calon dalam bentuk tanya jawab, sanggahan, dan tanggapan balik sehingga komunikasi berlangsung lebih dinamis, spontan, dan kompetitif. Kondisi tersebut memungkinkan munculnya strategi

kesantunan maupun pelanggaran kesantunan secara lebih nyata dibandingkan segmen lainnya.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode simak dan catat. Peneliti menyimak tayangan debat secara berulang-ulang untuk memahami konteks pembicaraan, topik debat, dan situasi tutur yang terjadi. Selanjutnya, seluruh tuturan kandidat ditranskripsikan secara verbatim ke dalam bentuk tertulis. Setelah proses transkripsi selesai, peneliti menandai tuturan yang mengandung bentuk kesantunan berbahasa maupun pelanggaran prinsip kesantunan sesuai dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, klasifikasi data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi tuturan yang relevan dengan fokus penelitian serta menghilangkan data yang tidak berkaitan. Tahap berikutnya adalah klasifikasi data, yaitu mengelompokkan tuturan berdasarkan kategori kesantunan dan pelanggaran kesantunan sesuai teori Leech serta Brown dan Levinson. Selanjutnya, penarikan kesimpulan

dilakukan dengan mengidentifikasi pola-pola penggunaan strategi kesantunan, bentuk pelanggaran kesantunan, serta karakteristik komunikasi masing-masing pasangan calon dalam debat politik.

Pada bagian ini menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian yang dianggap perlu untuk memperkuat naskah yang dipublikasikan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini menganalisis kesantunan berbahasa dalam debat publik pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024 dengan menggunakan teori prinsip kesantunan Geoffrey Leech serta strategi kesantunan Brown dan Levinson. Berdasarkan hasil analisis terhadap 91 data tuturan, ditemukan penggunaan lima maksim kesantunan, yaitu maksim kebijaksanaan, penghargaan, kesepakatan, simpati, dan kerendahan hati, serta beberapa bentuk pelanggaran terhadap maksim tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa maksim kebijaksanaan merupakan bentuk kesantunan yang paling dominan dengan jumlah 20

data. Maksim ini umumnya muncul ketika pasangan calon menyampaikan program kerja, solusi, dan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Salah satu contohnya tampak pada tuturan Paslon 02 yang menjelaskan pentingnya infrastruktur penunjang pariwisata bagi kemajuan daerah. Tuturan tersebut menunjukkan upaya memaksimalkan manfaat bagi masyarakat sehingga sesuai dengan konsep maksim kebijaksanaan yang dikemukakan Leech.

Selain itu, ditemukan pula penggunaan maksim penghargaan sebanyak 17 data. Maksim ini ditunjukkan melalui pemberian apresiasi, ucapan terima kasih, maupun pengakuan terhadap kontribusi lawan debat. Misalnya, tuturan “Selamat Pak Rusdy Mastura atas pencapaiannya” dan “Saya ingin mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Pak Rusdy Mastura selama menjabat gubernur.” Kedua tuturan tersebut mencerminkan upaya penutur untuk memaksimalkan penghargaan kepada pihak lain sebagaimana dijelaskan dalam teori Leech.

Maksim kesepakatan ditemukan sebanyak 13 data. Bentuk ini tampak

pada penggunaan ungkapan persetujuan, dukungan, maupun penekanan terhadap tujuan bersama. Contohnya terdapat pada tuturan "Saya banyak setuju dengan apa pikiran dia" yang menunjukkan adanya usaha membangun kesamaan pandangan dengan lawan debat. Menurut Leech, kesepakatan merupakan salah satu cara menjaga hubungan sosial yang harmonis dalam interaksi.

Selanjutnya, maksim simpati ditemukan sebanyak 10 data. Maksim ini terlihat dalam tuturan yang menunjukkan kepedulian terhadap kondisi masyarakat, seperti persoalan pendidikan, kemiskinan, dan kesejahteraan sosial. Sementara itu, maksim kerendahan hati ditemukan dalam jumlah yang lebih sedikit, yaitu 4 data.

Selain bentuk kesantunan, penelitian ini juga menemukan pelanggaran prinsip kesantunan. Pelanggaran yang paling dominan adalah pelanggaran maksim kerendahan hati sebanyak 10 data. Pelanggaran ini umumnya muncul ketika pasangan calon menonjolkan keberhasilan, penghargaan, atau capaian yang dimiliki selama menjabat. Misalnya, tuturan yang

menyebut pembangunan ratusan kilometer jalan, perolehan berbagai penghargaan, maupun keberhasilan program yang telah dilaksanakan. Dalam perspektif Leech, tuturan tersebut termasuk bentuk pemaksimalan pujian terhadap diri sendiri sehingga bertentangan dengan prinsip kerendahan hati.

Pelanggaran lain yang ditemukan ialah pelanggaran maksim kesepakatan sebanyak 9 data, pelanggaran maksim penghargaan sebanyak 5 data, pelanggaran maksim simpati sebanyak 2 data, dan pelanggaran maksim kebijaksanaan sebanyak 1 data. Pelanggaran-pelanggaran tersebut umumnya muncul ketika pasangan calon menyampaikan kritik, sanggahan, atau penolakan terhadap argumentasi lawan debat.

Berdasarkan teori Brown dan Levinson, ditemukan tiga strategi kesantunan, yaitu *positive politeness*, *negative politeness*, dan *bald-on record*. Strategi yang paling dominan ialah *positive politeness* dengan jumlah 57 data. Strategi ini tampak melalui penggunaan kata "kita" dan "kami", pemberian apresiasi kepada lawan debat, serta upaya membangun solidaritas dengan masyarakat.

Dominannya penggunaan *positive politeness* menunjukkan bahwa para pasangan calon berusaha membangun citra positif dan menjaga hubungan sosial yang baik di hadapan publik.

Strategi *negative politeness* ditemukan sebanyak 11 data. Strategi ini umumnya digunakan ketika pasangan calon menyampaikan pertanyaan, permintaan klarifikasi, atau kritik secara lebih hati-hati agar tidak terlalu mengancam muka lawan tutur. Adapun strategi *bald-on record* ditemukan sebanyak 23 data dan banyak digunakan saat pasangan calon menyampaikan kritik, penolakan, maupun penegasan secara langsung. Penggunaan strategi ini menunjukkan bahwa konteks debat politik tidak hanya menuntut kesantunan, tetapi juga ketegasan dalam mempertahankan argumentasi.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa dalam debat politik bersifat dinamis. Di satu sisi, pasangan calon berupaya menjaga kesantunan melalui penghargaan, kesepakatan, dan orientasi pada kepentingan masyarakat. Di sisi lain, situasi kompetitif dalam debat mendorong

munculnya pelanggaran kesantunan, terutama dalam bentuk penonjolan diri, kritik langsung, dan sanggahan terhadap lawan debat. Dengan demikian, kesantunan berbahasa dalam debat politik tidak hanya berfungsi menjaga hubungan interpersonal, tetapi juga menjadi strategi komunikasi untuk membangun citra politik dan memengaruhi masyarakat. Suryawin., dkk (2022) menjelaskan bahwa penggunaan tuturan dalam komunikasi publik tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengandung tujuan pragmatis tertentu yang berkaitan dengan maksud dan strategi penutur.

Tabel 1 Temuan Kesantunan dan Pelanggaran (Leech)

No	Jenis Maksim	Jumlah Data
1	Maksim Kebijaksanaan	20
2	Maksim Penghargaan	17
3	Maksim Kesepakatan	13
4	Maksim Simpati	10
5	Maksim Kerendahan Hati	4
6	Pelanggaran Maksim Kerendahan Hati	10

7	Pelanggaran Maksim Kesepakatan	9
8	Pelanggaran Maksim Penghargaan	5
9	Pelanggaran Maksim Simpati	2
10	Pelanggaran Maksim Kebijakan	1

**Tabel 2 temuan strategi kesantunan
(Brown dan Levinson)**

No	Strategi Kesantunan	Jumlah Data
1	Positive Politeness	57
2	Bald-on Record	23
3	Negative Politeness	11

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dalam debat publik pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024 ditemukan penggunaan prinsip kesantunan berbahasa menurut Geoffrey Leech serta strategi kesantunan menurut Brown dan Levinson. Bentuk kesantunan yang ditemukan meliputi maksim kebijakan, penghargaan, kesepakatan, simpati, dan

kerendahan hati, sedangkan bentuk pelanggaran yang ditemukan meliputi pelanggaran maksim kerendahan hati, kesepakatan, penghargaan, simpati, dan kebijaksanaan.

Maksim yang paling dominan digunakan adalah maksim kebijaksanaan. Dominannya penggunaan maksim ini menunjukkan bahwa pasangan calon cenderung menyampaikan program, solusi, dan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sementara itu, pelanggaran yang paling dominan adalah pelanggaran maksim kerendahan hati yang ditunjukkan melalui tuturan yang menonjolkan keberhasilan, capaian, atau penghargaan yang dimiliki oleh pasangan calon.

Berdasarkan strategi kesantunan Brown dan Levinson, strategi yang paling dominan digunakan adalah *positive politeness*. Strategi ini tampak melalui penggunaan ungkapan yang menunjukkan kebersamaan, penghargaan, dan upaya membangun kedekatan dengan lawan debat maupun masyarakat. Selain itu, ditemukan pula penggunaan *negative politeness* dan *bald-on record* yang umumnya digunakan ketika pasangan

calon menyampaikan pertanyaan, kritik, sanggahan, atau penegasan terhadap lawan debat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesantunan berbahasa dalam debat publik tidak hanya berfungsi sebagai sarana menjaga hubungan sosial antarpemenuh, tetapi juga digunakan sebagai strategi komunikasi politik untuk membangun citra diri, memengaruhi masyarakat, dan mempertahankan argumentasi dalam situasi kompetitif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan agar pasangan calon maupun tokoh politik lebih memperhatikan penggunaan bahasa yang santun dalam debat publik. Meskipun debat merupakan arena kompetisi untuk mempertahankan argumentasi dan memperoleh dukungan masyarakat, penggunaan bahasa yang santun tetap diperlukan agar komunikasi politik berlangsung secara etis, komunikatif, dan tidak menimbulkan konflik verbal yang berlebihan.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya

kesantunan berbahasa dalam komunikasi politik. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih kritis dan objektif dalam menilai penggunaan bahasa yang digunakan oleh para tokoh publik dalam berbagai forum komunikasi.

Bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengkajian pragmatik, khususnya yang berkaitan dengan prinsip kesantunan dan strategi kesantunan berbahasa. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian kesantunan berbahasa dengan menggunakan pendekatan teori pragmatik lainnya, seperti implikatur, tindak tutur, maupun analisis wacana kritis sehingga dapat menghasilkan perspektif yang lebih luas dan mendalam.

Selain itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan objek kajian yang lebih beragam, seperti debat presiden, *podcast* politik, media sosial, maupun komunikasi dalam pembelajaran. Penggunaan objek yang berbeda diharapkan dapat memperkaya kajian pragmatik serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penggunaan

kesantunan berbahasa dalam berbagai konteks komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A. (2021). Kesantunan Berbahasa Para Pasangan Calon dalam Debat Calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta: Kajian Sosiopragmatik. *Sebatik*, 25(1), 154–172.
- Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). *Politeness: Some Universals In Language Usage*. Cambridge University Press.
- Chaer, A. (2010). *Kesantunan Berbahasa*. Rineka Cipta.
- Haramain, I. (2023). Tindak Tutur Asertif Gubernur Nusa Tenggara Barat pada Media Sosial Instagram @Zulkieflimansyah. *Jurnal Bahasa*, 12.
- Leech, G. (1983). *Principles Of Pragmatics*. Longman.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd Ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana. (2005). *Kajian Wacana: Teori, Metode, dan Aplikasi Prinsip-Prinsip Analisis Wacana*. Tiara Wacana.
- Nadar, F. X. (2009). *Pragmatik dan Penelitian Pragmatik*. Graha Ilmu.
- Pranowo. (2009). *Berbahasa Secara Santun*. Pustaka Pelajar.
- Rahardi, K. (2005). *Pragmatik: Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia*. Erlangga.
- Siswoyo, R., & Yohanes, B. (2024). Kesantunan Berbahasa Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Debat Pemilu 2024: Kajian Pragmatik Leech. *Jurnal BAPALA*, 11(3), 171-184.
- Suryawin, P. C., Wijaya, M., & Isnaini, H. (2022). Tindak Tutur (Speech Act) dan Implikatur dalam Penggunaan Bahasa. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, 1(3).
- Umami, M., & Rusminto, N. E. (2021). Kajian Pragmatik dalam Penggunaan Bahasa Pada Media Sosial. *Jurnal Kata*, 5(2).
- Wijana, I. D. P. (1996). *Dasar-Dasar Pragmatik*. Andi Offset.